

## ABSTRAKS

### **Fitrianty Rohimatunisa: “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Bentuk Sertifikat Aset Tanah di Kabupaten Bandung Barat”**

Barang milik daerah atau aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah, salah satunya adalah aset tanah dan bangunan. Agar pemerintah daerah dapat mengelola aset tanah dan bangunan secara optimal dan lancar, pemerintah daerah wajib memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat seperti yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014. Dari total 1413 aset tanah dan bangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat baru mengantongi 28 sertifikat sedangkan 33 aset tanah sedang dalam proses sertifikasi. Lambatnya kinerja pemerintah dalam proses inventarisasi yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya aset Kabupaten Bandung Barat yang belum bersertifikat atau memiliki bukti kepemilikan atas aset tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan barang milik daerah (aset) dalam bentuk sertifikat aset tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat serta apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah (aset) dalam bentuk sertifikat aset tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam bentuk Sertifikat Aset Tanah di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di analisis menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta teknik studi kepustakaan dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam proses pengelolaan barang milik daerah (aset) dalam bentuk sertifikat aset tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor penghambatnya adalah kurangnya kelengkapan secara administrasi seperti berkas-berkas atau persyaratan-persyaratan yang akan diajukan untuk proses sertifikat aset tanah, adanya pengakuan dari pihak luar, dan keterbatasan peralatan (dukungan sarana dan prasarana) yang dibutuhkan saat dilapangan.

**Kata Kunci: Implementasi Peraturan Pemerintah, Sertifikat Aset Tanah**

## ABSTRACTS

### **Fitrianty Rohimatunisa: “Implementation of Government Regulation No. 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property in the Form of Land Asset Certificate in West Bandung Regency”**

Regional property or regional assets are important resources for local government as the main support of local revenue, one of which is land and building assets. In order for the regional government to manage land and building assets optimally and smoothly, the regional government must have proof of ownership or certificate as stated in Article 43 paragraph (1) and paragraph (2) of Government Regulation (PP) No. 27 of 2014. Out of a total of 1413 land and building assets, the West Bandung Regency Regional Government only holds 28 certificates while 33 land assets are in the process of certification. The slow performance of the government in the inventory process that is carried out has caused many assets of West Bandung Regency that have not been certified or have proof of ownership of the assets.

The purpose of this research was to determine the process of managing regional property (assets) in the form of land assets certificates in the West Bandung Regency Regional Government and what are the inhibiting factors in the management of regional property (assets) in the form of land assets certificates in the West Bandung Regency Regional Government.

The theories used in this research are Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn's theories which consist of policy standards and objectives, resources, communication between organizations and strengthening activities, characteristics of implementing agents, disposition of implementors, environment of social, economic and political conditions.

This research was conducted using descriptive analysis method, which describes or explains how the implementation of Government Regulation No. 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property in the form of Land Asset Certificate in West Bandung Regency, then analyzed using SWOT analysis. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques carried out by interview techniques and literature study and documentation techniques.

Based on the results of data analysis and discussion, it was concluded that in the process of managing regional property (assets) in the form of land asset certificate in the West Bandung Regency Regional Government has not run optimally. The inhibiting factors are the lack of administrative completeness such as the files or requirements that will be submitted for the land asset certificate process, the recognition from outside parties, and the limited equipment (facilities and infrastructure support) needed when in the field.

**Keywords: Implementation of Government Regulation, Land Asset Certificate**